

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era derasnya arus globalisasi saat ini, setiap unit dituntut untuk siap mendukung kelancaran program pembangunan nasional. Dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sebagai modal utama pembangunan. Salah satu modal utama pembangunan itu adalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian paling penting untuk membentuk kepribadian suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan oleh pendidikan. Hal ini mengingat keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dunia pendidikan dituntut melakukan reformasi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan pada masa yang akan datang.

Selaras dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia. Pada tanggal 25 s.d 27 September 2015 terjadi pertemuan antara kepala negara dan pemerintahan yang tergabung dalam *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.¹ Dalam pertemuan tersebut berhasil mendeklarasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang akan dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan SDGs tersebut yaitu adanya pendidikan yang berkualitas (*quality education*) yang berbunyi *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.*²

¹ *United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

(<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>) h.4. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2019

² *Ibid.*, h.19

Seruan pendidikan berkualitas merupakan langkah besar untuk memastikan bahwa semua anak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas mengacu pada sistem pendidikan yang melalui proses pemograman, struktur, dan konten yang memungkinkan terciptanya lingkungan dan peserta didik yang sehat. Kurikulum dan materi ajar yang baik sangat berperan dalam menghasilkan *output* yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Pemerintah berupaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dengan memperbaiki tatanan sistem pendidikan melalui pemberlakuan Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 diwujudkan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai muatan pelajaran ke dalam berbagai tema².

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa “Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3*

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/32160/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003.pdf>). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

² Sukayati dan Sri Wulandari, *Pembelajaran Tematik di SD*, (Jogyakarta: Depdiknas, 2009). h.13.

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945".³

Pelaksanaan muatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus memperhatikan pengembangan nilai karakter dan pengembangan sikap peserta didik. Kurikulum 2013 memandang bahwa pengembangan sikap menjadi salah satu hal yang ditekankan karena peserta didik akan menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki pribadi yang berkarakter mulia.

Menurut Daryono melalui muatan pelajaran PPKn berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.⁴ Berdasarkan pandangan tersebut dapat ditekankan bahwa PPKn bukan hanya muatan pelajaran yang memfokuskan pada materi namun lebih kepada pembinaan karakter peserta didik, oleh karena itu PPKn sangat penting diajarkan dijenjang sekolah dasar.

Salah satu wujud pemerintah untuk memunculkan pribadi yang berakhlak mulia adalah dengan cara penguatan pendidikan karakter (PPK). Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan hal yang benar dan hal yang salah, tetapi pendidikan karakter membentuk kebiasaan (*habit*) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik serta mempratikannya dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Untuk mengembangkan potensi peserta didik yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukannya tenaga pendidik atau guru yang mampu menciptakan peserta didik untuk bersaing secara global. Guru harus memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, mampu berkomunikasi

³ Udin S Winatapura, *Pembelajaran PKN di SD*, (<http://repository.ut.ac.id/4011/1/PDGK4201-M1.pdf>), h. 15. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

⁴ M. Daryono, *Pengantar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011),h. 1.

⁵ Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter berbasis Nilai&Etika di Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012). h. 21.

baik dengan peserta didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya.⁶ Guru diharapkan selalu berpikir dan bertindak secara kreatif. Tanpa memiliki kreativitas yang memadai, guru akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Guru memiliki peran utama dalam proses pembelajaran untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangun rasa ingin tahu, mendorong kemandirian, dan menciptakan kondisi berhasil dalam belajar. Kinerja dan kompetensi guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam perkembangan kemampuan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak trampil menjadi trampil, dari ketergantungan menjadi mandiri. Menurut Muh. Ilyas Ismail berhasil tidaknya pelaksanaan kurikulum disekolah sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki guru.⁷ Kompetensi ini dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah kreativitas yang dimiliki oleh guru. Kemampuan kreatif merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh guru agar terciptanya lingkungan belajar yang mendorong peserta didik menjadi kreatif. Kemajuan pendidikan memerlukan tingkatan kemampuan kreatif yang tinggi dari para guru. Guru dituntut untuk kreatif yaitu memiliki kemampuan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara kreatif, sehingga peserta didik menggemari ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadanya dan membuat peserta didik berpikir secara kreatif pula.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara dengan wali kelas dan peserta didik kelas III Sekolah Dasar Negeri (SDN) Susukan 06 Pagi menyatakan bahwa selama berlangsungnya pembelajaran, bahan ajar yang digunakan secara konsisten dalam pembelajaran adalah buku teks tematik kurikulum 2013. Sebagian peserta didik masih ada yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi. Selain itu, guru hanya memberikan tugas tidak ada

⁶ Fitri Oviyanti, Tantangan Pengembangan Pendidikan Guru di Era Global, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No. 02, Oktober, 2013, h. 273.

⁷ Muh. Ilyas Ismail, 'Kinerja Dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran', *Lentera Pendidikan*, 13.1 (2010), h. 44–63.

penjelasan materi yang dilakukan sebelumnya. Diantara materi muatan pelajaran PPKn yang ada di dalam pembelajaran tematik kelas III, peserta didik mengalami kesulitan belajar pada pembelajaran tema “Kewajiban dan Hakku”. Peserta didik banyak yang sulit membedakan contoh perilaku yang termasuk hak dan perilaku yang termasuk kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Guru menilai bahwa dalam tema “Kewajiban dan Hakku” terdapat beberapa materi yang harus dijelaskan secara rinci. Sumber belajar yang digunakan masih lebih banyak komposisi tulisan daripada gambarnya. Selain itu jarang ditemukan sumber belajar mandiri lain yang dapat menjadi tambahan pembelajaran peserta didik secara mandiri.

Dalam kenyataannya tidak ada sumber belajar selain buku teks, ketersediaan buku teks yang ada masih belum mencukupi kebutuhan peserta didik. Guru juga merasa bahwa materi yang ada dalam buku teks kurikulum 2013 yang disediakan pemerintah sangat terbatas sehingga guru tetap menggunakan buku-buku KTSP untuk menunjang proses pembelajaran. Dari hal tersebut disimpulkan guru membutuhkan bahan ajar lain selain buku pelajaran dari pemerintah untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Meskipun buku untuk kurikulum 2013 sudah tersedia, guru hendaknya tidak hanya terpacu atau menggunakan buku-buku yang sudah tersedia dan tinggal pakai. Untuk mewujudkan tujuan *SDGs* dalam bidang pendidikan perlu adanya peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. Para pendidik hendaknya mampu mengembangkan bahan ajar secara mandiri sehingga tidak tergantung dengan bahan ajar yang sudah tersedia.

Untuk mengembangkan kemandirian peserta didik dan mendukung gerakan literasi nasional, salah satu bahan ajar yang bisa digunakan adalah modul. Menurut Daryanto, modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik.⁸ Selain itu

⁸ Daryanto, *Menyusun Modul Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013). h. 9.

menurut Cece Wijaya pembelajaran menggunakan modul berfungsi untuk hal-hal sebagai berikut: (1) peningkatan motivasi belajar secara maksimal; (2) peningkatan kreativitas guru dalam mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan pelayanan individual yang lebih mantap..⁹

Keberadaan pembelajaran menggunakan modul dapat dipakai sebagai alat mengukur kemampuan peserta didik untuk memahami suatu materi. Untuk itu modul sudah selayaknya dinyatakan sebagai penunjang pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya. Misalnya hasil penelitian dari Yulianti yang menerangkan bahwa modul yang telah dikembangkan layak dengan kategori sangat baik sebagai salah satu pendamping bahan ajar pembelajaran tematik di kelas III sekolah dasar.¹⁰ Selain itu terdapat hasil penelitian lain yang dipaparkan oleh Tamami yang menjelaskan bahwa pengembangan modul yang dilakukan efektif digunakan dalam pembelajaran PPKn kelas VIII SMP.¹¹ Modul yang telah dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip pengembangan modul sehingga mampu mencapai tujuan pengembangan modul dan memiliki kemenarikan untuk digunakan dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengembangkan modul berbasis *contextual teaching and learning* pada pembelajaran PPKn tema kewajiban dan hakku di kelas III sekolah dasar. Tujuannya agar peserta didik memiliki sumber belajar mandiri untuk memahami pembelajaran PPKn tema “Kewajiban dan Hakku” serta mampu mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan kehidupan yang nyata sehari-hari.

⁹ Cece Wijaya, dkk., *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 97.

¹⁰ Yulianti dan Nova Tutiningsih, *Pengembangan Modul Tematik Berbasis 4C Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning Kelas 3 Subtema 3*. (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2020), h.6.

¹¹ Siti Tamami, *Pengembangan Modul PPKn Berbasis Masalah Pada Materi Norma dan Keadilan Siswa Kelas VIII SMP*. (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2020). h.8.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Sebagian besar peserta didik belum memahami materi kewajiban dan hak.
2. Guru dan peserta didik dalam pembelajaran PPKn hanya berpatok pada buku tema
3. Diperlukan bahan ajar PPKn yang menarik, efektif, dan mudah dipahami
4. Perlunya mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas III Sekolah Dasar.
2. Materi PPKn yang dikembangkan adalah materi kewajiban dan hak sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 3.2 dan 4.2

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengembangkan modul berbasis *contextual teaching and learning* pada pembelajaran PPKn tema kewajiban dan hakku di kelas III sekolah dasar?
2. Bagaimana kelayakan modul berbasis *contextual teaching and learning* pada pembelajaran PPKn tema kewajiban dan hakku di kelas III sekolah dasar?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna sebagai penunjang dalam proses pembelajaran dan sebagai sumber belajar mandiri untuk peserta didik, khususnya pada pembelajaran PPKn.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

Mendorong guru dalam mengajar muatan pelajaran PPKn Tema Kewajiban dan Hakku agar menggunakan media yang menyenangkan namun tetap informatif. Modul berbasis *contextual teaching and learning* mendorong guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bahan ajar yang cocok dalam menyampaikan pembelajaran.

b. Bagi Sekolah

Hasil pengembangan modul berbasis *contextual teaching and learning* diharapkan mampu menjadi bahan ajar yang mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

c. Bagi Peserta Didik

Sebagai bahan ajar yang menyenangkan. Peserta Didik dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri dan dapat melakukan kegiatan dimana saja dan kapan saja.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau acuan dalam mengembangkan modul berbasis *contextual teaching and learning* dalam pembelajaran PPKn selanjutnya, serta dapat memberikan referensi bagi peneliti yang mengembangkan bahan ajar yang inovatif.